



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

RENCANA KERJA
(RENJA)

2023

Alamat : Jalan Perjuangan No 03 Kel. Kali, Kec. Biau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD. Dalam prosesnya penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja OPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Selama pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra OPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

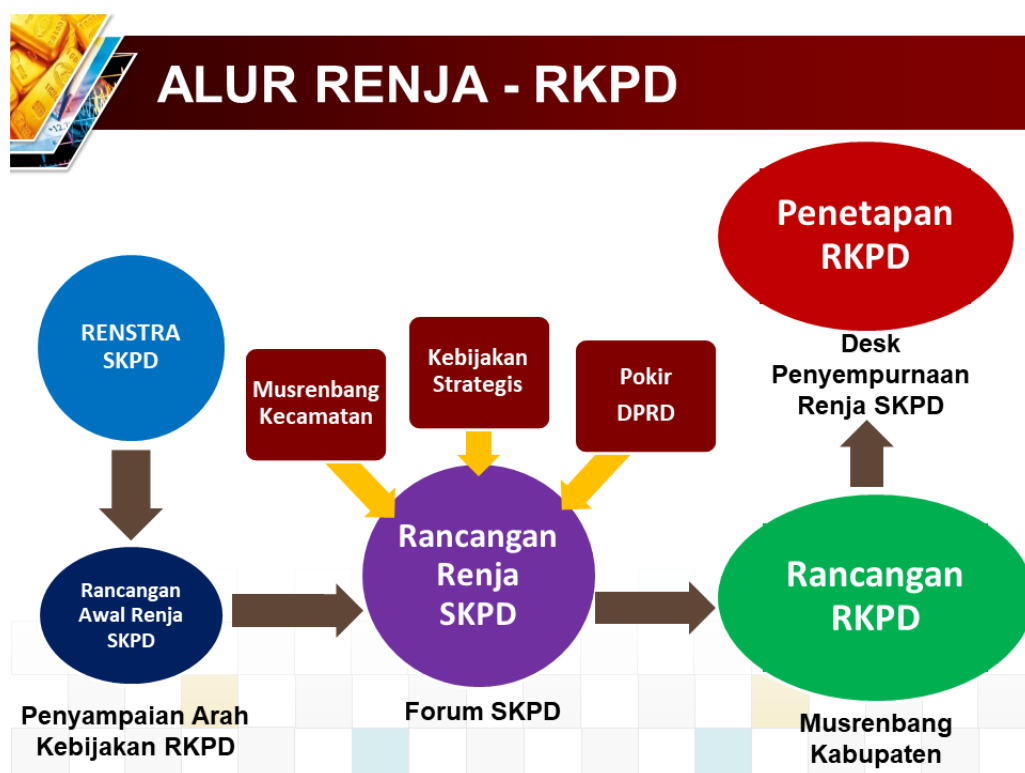
Rancangan Awal Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan dengan demikian Rancangan Awal Renja BPKAD Tahun Anggaran 2024 akan lebih konkrit dan terukur dengan memuat tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.2 Ranhir Renja BPKAD Tahun 2023
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :



1.2. Landasan hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 01).
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol; dan
- 14) Peraturan Bupati Buol Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol tahun 2024 bertujuan sebagai dokumen acuan resmi bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 disusun dengan maksud:

- 1) Memberikan gambaran bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol terhadap sasaran dan capaian strategis yang akan dicapai;
- 2) Sebagai alat ukur dalam mengetahui *progress* pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol atas keberhasilan program kegiatan, berdasarkan data dan informasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- 3) Sebagai landasan formal, strategis dan operasional bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan terukur;

- 4) Sebagai evaluasi dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, baik secara personal aparatur maupun secara institusi;
- 5) Memudahkan seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan;
- 6) Memudahkan seluruh jajaran aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan; dan
- 7) Sebagai upaya perwujudan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Buol.

Melalui penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 maka dapat diproyeksikan kebutuhan anggaran dan pengalokasiannya pada setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN BUOL TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buol

Pada bagian ini menguraikan tentang revidi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra 2018-2022 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buol melaksanakan program kegiatannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol selaku SKPD/OPD Tahun 2023 diluar selaku fungsi SKPKD memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp165.342.289.899,00 yang terealisasi sebesar Rp159.455.989.658,00 atau sebesar 96,44 persen dan terdiri dari: 1)belanja Operasi sebesar Rp 14.450.338.079,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.936.700.157,00 atau sebesar 96,45%; 2) Belanja Modal sebesar Rp418.350.385,00 dengan realisasi sebesar Rp404.094.776,00 atau sebesar 96,59%; 3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4589192889 dengan realisasi sebesar Rp1392464344,00 atau sebesar 30,34%; 4) Belanja Transfer sebesar Rp146.264.082.393,00 dengan realisasi sebesar Rp146.235.727.209,00 atau sebesar 99,98%.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Kabupaten Buol Tahun 2019-2023 tercermin dalam pengelolaan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019-2023 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sampai dengan tahun 2023 per triwulan II (dua) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Berikut akan menyajikan evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2023 .

(Realisasi target kinerja hasil program dan keluran kegiatan s.d tahun 2019-2023 berdasarkan restra tahun 2018-2022)

| No | Program/kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | | Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | |
|----|--|----------|---|---|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|--|----|------------|----|-----------|---|
| | program | kegiatan | | Target Kinerja | Capaian Program | Realisasi Target | Keluaran Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Realisasi Kinerja (%) | Target Program dan Kegiatan | Realisasi Program dan Kegiatan | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 (5+7+9) | | 11 (10/4) | |
| | | | Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 90 | % | 70 | % | 80 | % | 80 | % | 100 | 85 | % | 85 | % | 94 | % | |
| | | | Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Aset sesuai Ketentuan yang Berlaku | 90 | % | 62,63 | % | 80 | % | 65 | % | 81 | 85 | % | 85 | % | 94 | % | |
| 1 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun Tepat Waktu | - | - | 57 | Dok | 57 | Dok | 57 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang di Susun | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang di Susun | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Jumlah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang di Susun | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD | Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang di Susun | - | - | 0 | Dok | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 5 | Penelitian Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dok Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | Jumlah DPA yang diteliti dan disahkan | - | - | 57 | Dok | 57 | Dok | 57 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6 | Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah OPD yang ikut serta | - | - | 57 | OPD | 57 | OPD | 57 | OPD | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 7 | Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | Jumlah BUMD dan BLUD yang di bina Manajemen Keuangan | - | - | 3 | BUMD/BLUD | 4 | BUMD/BLUD | 4 | BUMD/BLUD | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 8 | Pengeluaran Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan Daerah yang dikelola | - | - | 2 | BUMD/BLUD | 2 | BUMD/BLUD | 2 | BUMD/BLUD | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 9 | Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | Jumlah Regulasi Pembiayaan yang tersusun | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah /Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D | - | - | 70 | % | 80 | % | 75 | % | 94 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Jumlah Dok SPD | - | - | 920 | SPD | 708 | SPD | 1670 | SPD | 236 | - | - | - | - | - |
| | | | | | Jumlah Laporan Posisi Penerimaan Kas Daerah | - | - | 12 | Lap | 12 | Lap | 12 | Lap | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | Jumlah Dok SPJ di verifikasi | - | - | 22483 | SPJ | 22901 | SPJ | 15920 | SPJ | 70 | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Bendahara yang di Bina | - | - | 0 | OPD | 57 | OPD | 57 | OPD | 100 | - | - | - | - | - | | |
| | | | Jumlah Dok SP2D yang Diterbitkan | - | - | 22465 | SP2D | 22901 | SP2D | 15920 | SP2D | 70 | - | - | - | - | - | | |
| | | | Jumlah Dok SP2B yang Diterbitkan | - | - | 142 | SP2B | 144 | SP2B | 144 | SP2B | 100 | - | - | - | - | - | | |
| | | | Jumlah Dok SPB yang Diterbitkan | - | - | 468 | SPB | 888 | SPB | 60 | SPB | 7 | - | - | - | - | - | | |
| | | | Jumlah Laporan Posisi Pengeluaran Kas Daerah | - | - | 12 | Lap | 12 | Lap | 12 | Lap | 100 | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | Persentase pembayaran Gaji ASN | - | - | 70 | % | 80 | % | 80 | % | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Persentase Hasil Evaluasi APBD yang ditindaklanjuti | - | - | 0 | % | 80 | % | 0 | % | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 1 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | 1 | Keg | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 2 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | 0 | Keg | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 3 | Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Buol | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | 0 | Keg | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | 1 4 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | - | - | 9 | Dok | 9 | Dok | 9 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Dok/Laporan tentang Barang Milik Daerah | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Dok/Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 5 | Penyusunan Standar Harga | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 6 | Inventarisasi Data Kepemilikan Aset Daerah/Kekayaan Daerah | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 7 | Falidasi/Pemuktahiran Data Aset Daerah | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 1 8 | Pengamanan Aset Daerah | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 1 9 | Peningkatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah | - | - | 0 | % | 80 | % | 0 | % | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang Tertib | - | - | 0 | Dok | 0 | Dok | 0 | Dok | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2 0 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu | - | - | 6 | OPD | 6 | OPD | 6 | OPD | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Jumlah Dok/Berita Acara Rekonsiliasi Belanja | - | - | 684 | Dok | 684 | Dok | 684 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 1 | Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan | - | - | 0 | OPD | 57 | OPD | 57 | OPD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 0 | Dok | 0 | Dok | 0 | Dok | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | | |
| 6 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 3 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | | |
| | | 2 4 | Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | - | - | 0 | 0 | 0 | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2 5 | Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | - | - | 70 | % | 80 | % | 80 | % | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Temuan Oleh Inspektorat/BPK | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | Tersusunnya Akip OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | Dok Standar Penilaian SPIP | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan | - | - | 84 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 100 | - | - | - | - | - |
| | Dok IKU & PK | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | | |
| | Jumlah Laporan Kinerja (LKj) OPD | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|---|------------|------|-----|------|----|------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dok Renstra & Renja | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Dok Rencana Kerja & Dok Pelaksanaan Anggaran | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Laporan TEPPRA OPD | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Laporan Keuangan OPD yang disusun sesuai SAP | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Laporan Realialisasi Keuangan yang disusun | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Dok Laporan Aset | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | 166,2 5 | % | 80 | % | 76 | % | 95 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 6 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | - | - | 96 | Keg | 35 | Keg | 35 | Keg | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 7 | Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | - | - | 12 | Bln | 12 | Bln | 12 | Bln | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 8 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | - | - | 81,67 | % | 80 | % | 78 | % | 98 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 9 | Pembangunan Gedung Kantor | - | - | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | - | - | 0 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | - | - | 55 | Unit | 196 | Unit | 55 | Unit | 28 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | - | - | 0 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | - | - | 27 | Unit | 35 | Unit | 27 | Unit | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3 4 | Persentase Pemenuhan Penunjang Kerja Aparatur | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | - | 0 | Psg | 0 | Psg | 0 | Psg | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 6 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | - | - | 0 | Psg | 80 | Psg | 80 | Psg | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3 7 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah | - | - | 0 | Org | 0 | Org | 0 | Org | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 8 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | - | - | 0 | Org | 0 | Org | 0 | Org | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 9 | Studi Banding Pengembangan Wawasan Tentang Penatausahaan Keuangan di Propinsi/Kabupaten/Kota Lainnya | - | - | 0 | Org | 0 | Org | 0 | Org | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4 0 | Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Dok, Surat & Laporan yang terselesaikan | - | - | 3 | Dok | 3 | Dok | 3 | Dok | 100 | - | - | - | - | - | - |

Sumber Data BPKAD 2022

Tabel 2.2 Berikut akan menyajikan evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2023 .

(Realisasi target kinerja hasil program dan keluran kegiatan s.d tahun 2023 dan rencana perubahan target kinerja hasil program dan keluran kegiatan tahun 2024-2023)

| No | Program /Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|----|--|---|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | Program | Kegiatan | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Realisasi Kinerja (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (5+7+9) | 11 (10/4) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Tersusun | 8 Dok | - - | - - | - - | - | 3 Dok | 2 Dok | 25 % |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan (RENJA & RESTRA) Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 0 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD Yang Tersusun | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 0 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 0 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD Yang Tersusun | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 0 Dok | 1 Dok | 100 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LKJiP Yang Tersusun | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 0 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan TEPPRA Yang Tersusun | 12 Dok | - - | - - | - - | - | 12 Dok | 4 Dok | 33 % |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan | 3 Dok | - - | - - | - - | - | 3 Dok | 1 Dok | 33 % |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan | 14 Dok | - - | - - | - - | - | 12 Dok | 6 Dok | 43 % |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah SK dan Surat Tugas | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen SPP dan SPJ Yang Dilaksanakan | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2 Keg | - - | - - | - - | - | 2 Keg | 1 Keg | 50 % |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan | 1 Keg | - - | - - | - - | - | 1 Keg | 1 Keg | 100 % |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Bimtek Perundang-undangan | 1 Keg | - - | - - | - - | - | 1 Keg | 1 Keg | 100 % |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum | 7 Keg | - - | - - | - - | - | 7 Keg | 0 Keg | 0 % |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat listrik/Instalasi | 8 Unit | - - | - - | - - | - | 8 Unit | 2 Unit | 25 % |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 Unit | - - | - - | - - | - | 11 Unit | 3 Unit | 21 % |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 11 Set | - - | - - | - - | - | 6 Set | 2 Set | 18 % |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan logistik Kantor | 11 Set | - - | - - | - - | - | 10 Set | 5 Set | 45 % |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah kegiatan cetak dan Penggandaan | 10 Keg | - - | - - | - - | - | 10 Keg | 0 Keg | 0 % |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Keg | - - | - - | - - | - | 1 Keg | 1 Keg | 100 % |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Keikutsertaan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 12 Keg | - - | - - | - - | - | 12 Keg | 5 Keg | 42 % |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Keg | - - | - - | - - | - | 3 Keg | 1 Keg | 33 % | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Struk Pembayaran Telpn/Internet/Air/Listrik | 3 Keg | - - | - - | - - | - | 3 Keg | 3 Keg | 100 % | |

| No | Program /Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | |
|---|--|--|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|
| | Program | Kegiatan | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Realisasi Kinerja (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (5+7+9) | | 11 (10/4) |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kwitansi/Nota Servis Peralatan dan Perlengkapan | 2 Keg | - - | - - | - - | - | 2 Keg | 1 Keg | 50 % | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan | 14 Keg | - - | - - | - - | - | 4 Keg | 2 Keg | 14 % | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Keg | - - | - - | - - | - | 3 Keg | 2 Keg | 67 % | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara | 9 Unit | - - | - - | - - | - | 1 Unit | 1 Unit | 11 % | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpilihara | 10 Unit | - - | - - | - - | - | 21 Unit | 2 Unit | 20 % | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor Terehabilitasi | 0 Keg | - - | - - | - - | - | 2 Keg | 0 Keg | 0 % | |
| II | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Kegiatan/Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun | 12 Dok | - - | - - | - - | - | 12 Dok | 3 Dok | 25 % | |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | Jmlah Dokumen KUA & PPAS Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | Jumlah Dokumen KUPA & PPAS Perubahan Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun | 63 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD Yang Tersusun | 63 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun | 63 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokuen DPA-Perubahan SKPD Yang Tersusun | 63 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 1 Dok | 50 % | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 1 Dok | 50 % | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | Jumlah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran Yang Tersusun | 2 Dok/Keg | - - | - - | - - | - | 2 Dok/Keg | 0 Dok/Keg | 0 % | | |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 1 Dok | 50 % | | |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Yang Tersusun | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % | | |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 8 Keg | - - | - - | - - | - | 8 Keg | 5 Keg | 63 % | | |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Yang Terlaksana | 3 Keg | - - | - - | - - | - | 3 Keg | 3 Keg | 100 % | | |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Yang Terlaksana | 1 Keg | - - | - - | - - | - | 1 Keg | 1 Keg | 100 % | | |
| Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Yang Terlaksana | 1 Keg | - - | - - | - - | - | 1 Keg | 0 Keg | 0 % | | |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan | Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Trasfer Lainnya Yang Terlaksana | 12 Keg | - - | - - | - - | - | 12 Keg | 5 Keg | 42 % | | | |

| No | Program /Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|---|--|--|------------|----------|------------|-----------|----------|
| | Program | Kegiatan | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Realisasi Kinerja (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (5+7+9) | | 11 (10/4) | | | | |
| | | Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran KAs dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak yang di susun | 4 | Dok | - | - | - | - | - | 1 | Keg | 1 | Keg | 25 | % |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembiayaan dan Penetapan Uang Daerah Sebagai Optimal Kas Yang Terlaksana | 1 | Keg | - | - | - | - | - | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | % |
| | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi SP2D | 4 | Dok | - | - | - | - | - | 1 | Keg | 1 | Keg | 25 | % |
| | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumla Regulasi tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Adminstrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun | 1 | Dok | - | - | - | - | - | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | % |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 7 | Keg | - | - | - | - | - | 7 | Keg | 1 | Keg | 14 | % |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 | Keg | - | - | - | - | - | 2 | Keg | 0 | Keg | 0 | % |
| | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah OPD Yang Melaksanakan Rekonsilias Realisasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban | 4 | Dok | - | - | - | - | - | 4 | Dok | 0 | Dok | 0 | % |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 | Keg | - | - | - | - | - | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | % |
| | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan PEMDA | 2 | Dok | - | - | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | 100 | % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Akutansi Pemerintah Daerah | 2 | Dok | - | - | - | - | - | 2 | Dok | 0 | Dok | 0 | % |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen Laporan TGR | 1 | Dok | - | - | - | - | - | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | % |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah | Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutnsi Pemerintah Daerah | 1 | Dok | - | - | - | - | - | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | % |
| | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Juma Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 | keg | - | - | - | - | - | 3 | keg | 1 | keg | 50 | % |
| | | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Naska Kajian Investasi BUMD, Naska Akadmik PERDA Penyertaan Modal BUMD, Dan Draf PERDA Penyertaan Modal BUMD | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | Dok | 0 | Dok | 0 | % |
| | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah desa yang memperoleh bantuan keuangan | 108 | Desa | - | - | - | - | - | 108 | Desa | 108 | Desa | 100 | % |
| | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah pertanggungjawaban dana darurat | 11 | Wilayah | - | - | - | - | - | 6 | Wilayah | 0 | Wilayah | 0 | % |

| No | Program /Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----|---|--|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | Program | Kegiatan | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Realisasi Kinerja (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (5+7+9) | 11 (10/4) |
| III | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun | 12 Dok | - - | - - | - - | - | 12 Dok | 1 Dok | 8 % |
| | | Penyusunan Standar Harga | Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis Dan Tipe Barang | 2 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 2 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Penilaian Barang Milik Daerah | Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kegiatan Koordinasi,Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan,Pemanfaatan, Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 4 Dok | - - | - - | - - | - | 4 Dok | 0 Dok | 0 % |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 1 Dok | - - | - - | - - | - | 1 Dok | 1 Dok | 100 % | |

Sumber Data BPKAD 2022

Secara umum Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2024. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dapat kami jelaskan berdasarkan program dan kegiatan dalam 2 (dua) tabel diatas yakni :

I. Tabel 2.1 Menyajikan evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2023

Tabel ini merupakan penjelasan atas realisasi target kinerja hasil program dan keluran kegiatan s.d tahun 2019-2023 berdasarkan restra tahun 2018-2022. Dalam tabel menunjukkan realisasi kinerja tahun 2019 dan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023. Sedandkan target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 serta Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan yakni 2023, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2023 mengacu Renstra Tahun 2018-2022 sedangkan nomenklatur program kegiatan Tahun 2023mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2023 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2022. Dan program/kegiatan tahun 2023 telah disesuaikan hasil meping program dan kegiatan tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) program dan 1 (satu) program yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan yakni pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 98 persen dari target sebesar 100 persen dari kinerja yang direncanakan dalam tahun 2023. Sedangkan bila disesuaikan dengan capaian restra 2018-2022 yang direncanakan target 80 persen yang terrealisasi sebesar 78 persen. Sedangkan untuk kegiatan yang direncanakan tahun 2023 dari 21 (dua satu) kegiatan yang tidak mencapai target 100 persen terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target yakni: 1) kegiatan Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah /Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan realisasi 94 persen; 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor realisasi 28 Parsen; 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional realisasi 77 persen.

Ketidak capaian program dan kegiatan diatas diindikasikan bahwa pada tahun 2023 adanya bencana non alam yakni pandemic covid-19. Dan dalam penanganan pandemik covid-19 terjadinya rekofusing anggaran dan terjadinya pegurangan dana transfer kedaerah, sehingga terjadi pengurangan pagu khususnya belanja modal yang berhubungan dengan peningkatan sarana dan parasarana aparatur, dan pembiayaan pemelihaaan rutin berkala kendaraan oprasional.

II. Tabel 2.2 Menyajikan evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2023

Tabel ini merupakan penjelasan atas realisasi target kinerja hasil program dan keluran kegiatan s.d tahun 2023 dan rencana perubahan target kinerja hasil program dan keluran kegiatan tahun 2024 menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD.

Ditahun 2023 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan/sub.kegiatan dimana capaian realisasi dalam tabel berdasarkan realisasi triwulan II (dua) bahwa dari 3 program masih dalam proses pelaksanaan dengan capaian masing-masing program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub.kegiatan yang dikelola oleh bagian sekretariat sebagai kegiatan operasional rutin kantor dengan tingkat capaian realisasi kegiatan diatas 25 (dua puluh lima) persen sedangkan untuk tingkat capaian realisasi sub.kegiatan sebgain besar diatas 20 (dua puluh) persen, hanya kegiatan belanja modal pengadaan barang dan rehabilitasi gedung yang masih belum mencapai targer disebabkan pelaksanaan pengadaan barang masih dalam tahap pemesanan dan tahap penyusunan kontrak.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan/sub.kegiatan yang dikelola oleh : 1) bidang Anggaran dari 12 (dua belas) sub.kegiatan tingkat capaian target sejumlah 25 persen pelaksanaan kegiatan yakni pelaksanaan pergeseran APBD tahap 1 dan tahap 2 sebagai pelaksanaan refofusing anggaran sebagaimana tindak lanjut amanat PERMENKEU No.17/PMK.7/2023 tentang pengelolaan TKDD TA.2023. Dan sesuai jadwal yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran terkofus pada TW III dan TW IV sehingga sampai dengan sata ini sub.kegiatan masih dalam proses pelaksanaan koodinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; 2) pelaksanaan kegiatan bidang Perbendaharaan terdiri dari 8 (delapan) sub.kegiatan dengan tingkat capaian 63 persen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan dan masih dalam proses pelaksanaan; 3) bidang Akutansi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akutansi pelaporan keuangan daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub.kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 14 persen, hal ini disebabkan output indikator dari 7 (tujuh) kegiatan yang dihasilkan baru 1 (satu) laporan yakni LKPD TA. 2023 yang merupakan fokus utama bidang akuntansi sehingga pelaksanaan sub.kegiatan TW I dan TW II yang menghasilkan laporan pembukuan pelaksanaan anggaran tahun 2023 sebagai tolak ukur capaian sub.kegiatan pada bidang akuntansi; dan 4) kegiatan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan teknis kewenangan dari BPKAD selaku SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah), terdiri dari 3 (tiga) sub.kegiatan dengan capaian realisasi sebesar 50 (lima puluh) persen, hal ini disebabkan pada sub.kegiatan analisis perencanaan dan peyaluran bantuan telah dilaksanakan yakni belanja ADD tahap.1 sesuai jadwal yang dtetapkan, sedangkan untuk kegiaan analisis invenstasi pemerintah daerah yang menghasilkan 3 (tiga) dokumen masih dalam proses kajian dan peyusunan. Sedangkan untuk sub.kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak belum ada realialisasi hal ini tergantung pada permohonan penggunaan dana belanja tidak terduga yang berkaitan dengan bencana atau kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi.
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah terdiri dari 8 (delapan) sub.kegiatan yang dikelola oleh bidang Aset dengan tingkat capaian realisasi sebesar 8 (delapan) persen dari 12 (dua belas) dokumen yang menjadi output kegiatan hanya 1 (satu) laporan yang terlaksana pada TW II(dua) ini, yakni pada sub.kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah. Hal ini bidang masing terfokus pada penyusunan data asset tahun 2023 sebagai bahan penyusunan LKPD TA. 2023 sehingga untuk sub.kegiatan dari laporan data tahun 2023 masih pada tahap pelaksanaan kegiatan belum dapat mengahasilkan dokumen yang lengkap sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan

tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol melakukan koordinasi dengan seluruh OPD yang berada di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Buol. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buol yaitu **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DENGAN BERTUMPU PADA KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN RAKYAT”**.

Misi Kabupaten Buol Tahun 2017-2024 khususnya pada misi ke enam yaitu **“Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supermasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi”**. Berdasarkan misi diatas menjadi jelas arah dan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buol, dan pada akhirnya akan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan bersih (*good government*) dengan melaksanakan akuntabilitas publik (*public accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada pola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah .

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya meningkatkan sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol secara administratif telah melaksanakan kegiatan sesuai program dan kebijakan organisasi. Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Namun demikian, secara umum kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan tujuan program. Untuk lebih jelas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dapat kami sajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Inikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

| Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2022) | Target Kinerja | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--|--|----------------|------|------|------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah | A | A | A | A | A | A |

Sumber Data : BPKAD 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi, IKU perlu ditetapkan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai dasar penilaian setiap tingkatan. Sekurang-kutrnangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan dilakukannya evaluasi ini, maka setiap daerah di dorong untuk melaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yang dilaksanakannya sesuai dengan indikator kinerja kunci yang

ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator kinerja kunci ini akan dituangkan dalam berbagai laporan pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara rinci Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja BPKAD Kab. Bol Tahun 2018 - 2022

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisa | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------|---|------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------|----|----|----|---|------------|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 65 | % | 70 | % | 80 | % | 85 | % | 90 | % | 70 | % | 80 | % | 85 | % | 90 | % | IKU |
| | Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Aset sesuai Ketentuan yang Berlaku | 65 | % | 70 | % | 80 | % | 85 | % | 90 | % | 62,63 | % | 80 | % | 85 | % | 90 | % | IKU |
| 2 | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun Tepat Waktu | 57 | Dok | 57 | Dok | 57 | Dok | - | - | - | - | 57 | Dok | 57 | Dok | - | - | - | - | IKP |
| 3 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang di Susun | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang di Susun | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang di Susun | 0 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 4 | Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang di Susun | 1 | Dok | 0 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 0 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 5 | Jumlah DPA yang diteliti dan disahkan | 57 | Dok | 57 | Dok | 57 | Dok | - | - | - | - | 57 | Dok | 57 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 6 | Jumlah OPD yang ikut serta | 57 | OPD | 57 | OPD | 57 | OPD | - | - | - | - | 57 | OPD | 57 | OPD | - | - | - | - | IKK |
| 7 | Jumlah BUMD dan BLUD yang di bina Manajemen Keuangan | 4 | BUMD/BLUD | 4 | BUMD/BLUD | 4 | BUMD/BLUD | - | - | - | - | 3 | BUMD/BLUD | 4 | BUMD/BLUD | - | - | - | - | IKK |
| 8 | Jumlah Pembiayaan Daerah yang dikelola | 2 | BUMD/BLUD | 2 | BUMD/BLUD | 2 | BUMD/BLUD | - | - | - | - | 2 | BUMD/BLUD | 2 | BUMD/BLUD | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Regulasi Pembiayaan yang tersusun | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 10 | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKP |
| 11 | Jumlah Dok SPD | 708 | SPD | 708 | SPD | 708 | SPD | - | - | - | - | 920 | SPD | 708 | SPD | - | - | - | - | IKK |
| 12 | Jumlah Laporan Posisi Penerimaan Kas Daerah | 12 | Lap | 12 | Lap | 12 | Lap | - | - | - | - | 12 | Lap | 12 | Lap | - | - | - | - | IKK |
| 13 | Jumlah Dok SPJ di verifikasi | 22526 | SPJ | 22901 | SPJ | 22901 | SPJ | - | - | - | - | 22483 | SPJ | 22901 | SPJ | - | - | - | - | IKK |
| 14 | Jumlah Bendahara yang di Bina | 57 | OPD | 57 | OPD | 57 | OPD | - | - | - | - | 0 | OPD | 57 | OPD | - | - | - | - | IKK |
| 15 | Jumlah Dok SP2D yang Diterbitkan | 22526 | SP2D | 22901 | SP2D | 22901 | SP2D | - | - | - | - | 22465 | SP2D | 22901 | SP2D | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Dok SP2B yang Diterbitkan | 4 | SP2B | 144 | SP2B | 144 | SP2B | - | - | - | - | 142 | SP2B | 144 | SP2B | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Dok SPB yang Diterbitkan | 0 | SPB | 888 | SPB | 888 | SPB | - | - | - | - | 468 | SPB | 888 | SPB | - | - | - | - | IKK |
| 16 | Jumlah Laporan Posisi Pengeluaran Kas Daerah | 12 | Lap | 12 | Lap | 12 | Lap | - | - | - | - | 12 | Lap | 12 | Lap | - | - | - | - | IKK |
| 17 | Persentase pembayaran Gaji ASN | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKK |
| 18 | Persentase Hasil Evaluasi APBD yang ditindaklanjuti | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | 0 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKP |
| | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD yang dilaksanakan | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | IKK |
| | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD yang dilaksanakan | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan | 1 | Keg | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | 0 | Keg | 0 | Keg | - | - | - | - | IKK |
| 19 | Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun | 9 | Dok | 9 | Dok | 9 | Dok | - | - | - | - | 9 | Dok | 9 | Dok | - | - | - | - | IKP |
| 20 | Dok/Laporan tentang Barang Milik Daerah | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Dok/Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 21 | Jumlah Laporan Standar Harga | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 22 | Inventaris Barang Milik Daerah | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 23 | Dok Data Pengamanan dan Penghapusan Aset. | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 24 | Persentase Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Daerah | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | 0 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKK |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Proyeksi | | Catatan Analisa | | | | | |
|----|---|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------|------|---|--------------|------------|-----------|-----------------|------|---|---|---|------------|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang Tertib | 8 | Srttk | 0 | Dok | 0 | Dok | - | - | - | 0 | Dok | 0 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 25 | Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKP |
| 26 | Jumlah Dok/Laporan Pendapatan OPD | 6 | OPD | 6 | OPD | 6 | OPD | - | - | - | 6 | OPD | 6 | OPD | - | - | - | - | IKK |
| 27 | Jumlah Dok/Berita Acara Rekonsiliasi Belanja | 684 | Dok | 684 | Dok | 684 | Dok | - | - | - | 684 | Dok | 684 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 28 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 29 | Jumlah Aparatur yang mampu dalam Menyusun Laporan Keuangan OPD | 57 | OPD | - | OPD | 57 | OPD | - | - | - | 0 | OPD | 57 | OPD | - | - | - | - | IKK |
| 30 | Dok/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang tersusun | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | Dok | - | - | - | 0 | Dok | 0 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 31 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang di Susun tepat waktu | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 32 | Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 | Dok | 0 | Dok | 0 | Dok | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | IKK |
| 33 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Oleh Inspektorat/BPK | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | 70 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKK |
| 34 | Tersusunnya Akip OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Dok Standar Penilaian SPIP | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 35 | Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | 84 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKK |
| 36 | Dok IKU & PK | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Laporan Kinerja (LKj) OPD | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 37 | Dok Renstra & Renja | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Dok Rencana Kerja & Dok Pelaksanaan Anggaran | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 38 | Jumlah Laporan TEPPRA OPD | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 39 | Laporan Keuangan OPD yang disusun sesuai SAP | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Laporan Realialisasi Keuangan yang disusun | 12 | Dok | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | 12 | Dok | 12 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 40 | Jumlah Dok Laporan Aset | 4 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | 4 | Dok | 4 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| 41 | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | 166,3 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKP |
| | Keikutsertaan pada Kegiatan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 30 | Keg | 30 | Keg | 35 | Keg | - | - | - | 96 | Keg | 35 | Keg | - | - | - | - | IKK |
| | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kemasarakatan | 12 | Bln | 12 | Bln | 12 | Bln | - | - | - | 12 | Bln | 12 | Bln | - | - | - | - | IKK |
| 42 | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai | 65 | % | 70 | % | 80 | % | - | - | - | 81,67 | % | 80 | % | - | - | - | - | IKP |
| | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | - | - | - | 2 | Unit | 2 | Unit | - | - | - | - | IKK |
| | Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional | 12 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | - | - | - | 0 | Unit | 0 | Unit | - | - | - | - | IKK |
| | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 50 | Unit | 50 | Unit | 196 | Unit | - | - | - | 55 | Unit | 196 | Unit | - | - | - | - | IKK |
| | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 | Pkt | 0 | Unit | 0 | Unit | - | - | - | 0 | Unit | 0 | Unit | - | - | - | - | IKK |
| | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional | 20 | Unit | 20 | Unit | 35 | Unit | - | - | - | 27 | Unit | 35 | Unit | - | - | - | - | IKK |
| 43 | Menyusun rencana kebutuhan kepegawaian dan rumah tangga BPKAD | 2 | Dok | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | 2 | Dok | 2 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0 | Psg | 0 | Psg | 0 | Psg | - | - | - | 0 | Psg | 0 | Psg | - | - | - | - | IKK |
| | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 274 | Psg | 0 | Psg | 0 | Psg | - | - | - | 0 | Psg | 80 | Psg | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah | 2 | Org | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat & Bimtek | 0 | Org | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Studi Banding Pengembangan Wawasan Tentang Penatausahaan Keuangan | 2 | Org | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | 0 | Org | 0 | Org | - | - | - | - | IKK |
| 44 | Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | 1 | Dok | 1 | Dok | - | - | - | - | IKK |
| | Jumlah Dok, Surat & Laporan yang terselesaikan | 1 | Dok | 3 | Dok | 3 | Dok | - | - | - | 3 | Dok | 3 | Dok | - | - | - | - | IKK |

Sumber Data BPAKAD 2023

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja BPKAD Kab. Buol Tahun 2023 - 2024

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|------------|---|----------------|------|------|---------------|---------------|-------------------|------|----------|--------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 65 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | IKU |
| | Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Aset sesuai Ketentuan yang Berlaku | 65 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 62,63 % | 80 % | 85 % | 90 % | IKU |
| I | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Tersusun | | | | 3 Dok | 8 Dok | | | | | IKP |
| 2 | Jumlah Dokumen Perencanaan (RENJA & RESTRA) Yang Tersusun | - | - | - | 0 Dok | 2 Dok | - | - | 0 Dok | 2 Dok | IKK |
| 3 | Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 1 Dok | - | - | 2 Dok | 1 Dok | IKK |
| 4 | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 0 Dok | 1 Dok | - | - | 0 Dok | 1 Dok | IKK |
| 5 | Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 0 Dok | 1 Dok | - | - | 0 Dok | 1 Dok | IKK |
| 6 | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 0 Dok | 1 Dok | - | - | 0 Dok | 1 Dok | IKK |
| 7 | Jumlah Dokumen LKJIP Yang Tersusun | - | - | - | 0 Dok | 1 Dok | - | - | 0 Dok | 1 Dok | IKK |
| 8 | Jumlah laporan TEPRRA Yang Tersusun | - | - | - | 12 Dok | 12 Dok | - | - | 12 Dok | 12 Dok | IKK |
| II | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan | | | | 3 Dok | 3 Dok | | | | 3 Dok | IKP |
| 9 | Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan | - | - | - | 12 Dok | 14 Dok | - | - | 12 Dok | 14 Dok | IKK |
| 10 | Jumlah SK dan Surat Tugas | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 11 | Jumlah Dokumen SPP dan SPJ Yang Dilaksanakan | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| III | Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 2 Keg | 2 Keg | | | | | IKP |
| 12 | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 13 | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Bimtek Perundang-undangan | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| IV | Jumlah Layanan Administrasi Umum | | | | 7 Keg | 7 Keg | | | | | IKP |
| 14 | Jumlah Alat listrik/Instalasi | - | - | - | 8 Unit | 8 Unit | - | - | 8 Unit | 8 Unit | IKK |
| 15 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | 3 Unit | 14 Unit | - | - | 3 Unit | 14 Unit | IKK |
| 16 | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | - | - | - | 6 Set | 11 Set | - | - | 6 Set | 11 Set | IKK |
| 17 | Jumlah Bahan logistik Kantor | - | - | - | 10 Set | 11 Set | - | - | 10 Set | 11 Set | IKK |
| 18 | Jumlah kegiatan cetak dan Penggandaan | - | - | - | 10 Keg | 10 Keg | - | - | 10 Keg | 10 Keg | IKK |
| 19 | Jumlah kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 20 | Jumlah Keikutsertaan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | - | - | - | 12 Keg | 12 Keg | - | - | 12 Keg | 12 Keg | IKK |
| V | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3 Keg | 3 Keg | | | | | IKP |
| 21 | Struk Pembayaran Telpon/Internet/Air/Listrik | - | - | - | 3 Keg | 3 Keg | - | - | 3 Keg | 3 Keg | IKK |
| 19 | Kwitansi/Nota Servis Peralatan dan Perlengkapan | - | - | - | 2 Keg | 2 Keg | - | - | 2 Keg | 2 Keg | IKK |
| 20 | Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilaksanakan | - | - | - | 4 Keg | 14 Keg | - | - | 4 Keg | 14 Keg | IKK |
| VI | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3 Keg | 3 Keg | | | | | IKP |
| 21 | Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara | - | - | - | 1 Unit | 9 Unit | - | - | 1 Unit | 9 Unit | IKK |
| 22 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara | - | - | - | 21 Unit | 10 Unit | - | - | 21 Unit | 10 Unit | IKK |
| 23 | Jumlah Gedung Kantor Terehabilitasi | - | - | - | 2 Keg | 2 Keg | - | - | 2 Keg | 2 Keg | IKK |
| VII | Jumlah Kegiatan/Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun | | | | 12 Dok | 12 Dok | | | | | IKP |
| 24 | Jumlah Dokumen KUA & PPAS Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 25 | Jumlah Dokumen KUPA & PPAS Perubahan Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKP |
| 26 | Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 1 Dok | 63 Dok | - | - | 1 Dok | 63 Dok | IKK |
| 27 | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 1 Dok | 63 Dok | - | - | 1 Dok | 63 Dok | IKK |
| 28 | Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 1 Dok | 63 Dok | - | - | 1 Dok | 63 Dok | IKK |
| 29 | Jumlah Dokumen DPA-Perubahan SKPD Yang Tersusun | - | - | - | 1 Dok | 63 Dok | - | - | 1 Dok | 63 Dok | IKK |
| 30 | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-------------|--|----------------|------|------|---------------|---------------|-------------------|------|-----------|------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 32 | Jumlah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok/Keg | 2 Dok/Keg | - | - | 2 Dok/Keg | 2 Dok/Keg | IKK |
| 33 | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 34 | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 35 | Jumlah Kegiatan Kordinasi Dan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Yang Tersusun | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| VIII | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | 8 Keg | 8 Keg | | | | | IKP |
| 36 | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Yang Terlaksana | - | - | - | 3 Keg | 3 Keg | - | - | 3 Keg | 3 Keg | IKK |
| 37 | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Yang Terlaksana | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 38 | Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Yang Terlaksana | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 39 | Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Yang Terlaksana | - | - | - | 12 Keg | 12 Keg | - | - | 12 Keg | 12 Keg | IKK |
| 40 | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran KAs dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak yang di susun | - | - | - | 1 Dok | 4 Dok | - | - | 1 Dok | 4 Dok | IKK |
| 41 | Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembiayaan dan Penetapan Uang Daerah Sebagai Optimal Kas Yang Terlaksana | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 42 | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi SP2D | - | - | - | 1 Dok | 4 Dok | - | - | 1 Dok | 4 Dok | IKK |
| 43 | Jumla Regulasi tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Adminstrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| VIII | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | 7 Keg | 7 Keg | | | | | IKP |
| 44 | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | - | - | - | 2 Keg | 2 Keg | - | - | 2 Keg | 2 Keg | IKP |
| 45 | Jumlah OPD Yang Melaksanakan Rekonsilias Realisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban | - | - | - | 4 Dok | 4 Dok | - | - | 4 Dok | 4 Dok | IKK |
| 46 | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | - | 1 Keg | 1 Keg | - | - | 1 Keg | 1 Keg | IKK |
| 47 | Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan PEMDA | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKP |
| 48 | Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Akutansi Pemerintah Daerah | - | - | - | 2 Dok | 2 Dok | - | - | 2 Dok | 2 Dok | IKK |
| 49 | Dokumen Laporan TGR | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| 50 | Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutnsi Pemerintah Daerah | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| X | Juma Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 2 keg | 2 keg | | | | | IKP |
| 51 | Naska Kajian Investasi BUMD, Naska Akadmik PERDA Penyertaan Modal BUMD, Dan Draf PERDA Penyertaan Modal BUMD | - | - | - | 3 Dok | - | - | - | 3 Dok | - | IKK |
| 52 | Jumlah desa yang memperoleh bantuan keuangan | - | - | - | 108 Desa | 108 Desa | - | - | 108 Desa | 108 Desa | IKK |
| 53 | Jumlah pertanggungjawaban dana darurat | - | - | - | 6 Wilayah | 11 Wilayah | - | - | 6 Wilayah | 11 Wilayah | IKK |
| XI | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun | | | | 12 Dok | 12 Dok | | | | | IKP |

| No | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa | |
|----|--|----------------|------|------|------|-------|-------------------|------|----------|-------|-----------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 54 | Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis Dan Tipe Barang | - | - | - | - | 1 Dok | 2 Dok | - | - | 1 Dok | 2 Dok | IKK |
| 55 | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| 56 | Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 2 Dok | 1 Dok | - | - | 2 Dok | 1 Dok | IKK |
| 57 | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| 58 | Penilaian Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| 59 | Kegiatan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |
| 60 | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 4 Dok | 4 Dok | - | - | 4 Dok | 4 Dok | IKK |
| 61 | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | - | - | - | - | 1 Dok | 1 Dok | - | - | 1 Dok | 1 Dok | IKK |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol fokus dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Olehnya, terdapat beberapa isu penting dapat diangkat dalam Renja ini adalah :

- a) Tersedianya sumber daya manusia yang bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penatausahaan keuangan dan aset/barang milik daerah;
- b) Terciptanya koordinasi dan kemitraan dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol
- c) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.
- d) Meningkatnya alokasi dana desa, sehingga dibutuhkan peningkatan intensitas pembinaan dalam pengelolaanya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Perbandingan program/kegiatan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Buol yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Buol

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | | |
|---|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------------|---|-----------------------|---|----------------|-----------------|---------------------|--|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| BPKAD | | | | | 161.258.313.087 | | | | | | 161.258.313.087 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Layanan Perkantoran | 5 | Kegiatan | 11.679.955.427 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Layanan Perkantoran | 5 | Kegiatan | 11.679.955.427 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | Dokumen | 39.628.902 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | Dokumen | 39.628.902 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Renstra, Renja dan Berita Acara Musrenbang | 2 | Dokumen | 7.593.700 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Renstra, Renja dan Berita Acara Musrenbang | 2 | Dokumen | 7.593.700 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA Penetapan | 1 | Dokumen | 7.157.882 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA Penetapan | 1 | Dokumen | 7.157.882 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Perubahan RKA | 1 | Dokumen | 4.666.550 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Perubahan RKA | 1 | Dokumen | 4.666.550 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Penetapan DPA | 1 | Dokumen | 4.809.750 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Penetapan DPA | 1 | Dokumen | 4.809.750 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Perubahan DPA | 1 | Dokumen | 4.514.770 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Perubahan DPA | 1 | Dokumen | 4.514.770 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen LKJiP | 1 | Dokumen | 4.529.450 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen LKJiP | 1 | Dokumen | 4.529.450 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan / TEPPA | 12 | Dokumen | 6.356.800 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan / TEPPA | 12 | Dokumen | 6.356.800 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 6.532.627.116 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 6.532.627.116 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Buol, Biau, Kali | Daftar Gaji dan Tunjangan | 12 | Dokumen | 6.446.826.866 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Buol, Biau, Kali | Daftar Gaji dan Tunjangan | 12 | Dokumen | 6.446.826.866 | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Buol, Biau, Kali | SK dan Surat Tugas | 2 | Dokumen | 13.820.250 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Buol, Biau, Kali | SK dan Surat Tugas | 2 | Dokumen | 13.820.250 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen SPP dan SPJ | 2 | Dokumen | 71.980.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen SPP dan SPJ | 2 | Dokumen | 71.980.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 | Kegiatan | 240.867.200 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 | Kegiatan | 240.867.200 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan | 1 | Kegiatan | 56.131.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan | 1 | Kegiatan | 56.131.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting | |
|--|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------|--|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Bimtek Perundang-undangan | 1 | Kegiatan | 184.736.200 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Aparatur Yg Mengikuti Bimtek Perundang-undangan | 1 | Kegiatan | 184.736.200 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 | Kegiatan | 420.363.549 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 | Kegiatan | 420.363.549 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Alat listrik/Instalasi | 8 | Unit | 9.664.625 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Alat listrik/Instalasi | 8 | Unit | 9.664.625 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 | Unit | 28.833.750 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 | Unit | 28.833.750 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 11 | Set | 12.069.649 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 11 | Set | 12.069.649 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Bahan logistik Kantor | 11 | Set | 32.675.900 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Bahan logistik Kantor | 11 | Set | 32.675.900 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Buol, Biau, Kali | cetak dan Penggandaan | 10 | Kegiatan | 15.896.125 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Buol, Biau, Kali | cetak dan Penggandaan | 10 | Kegiatan | 15.896.125 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Dokumen | 6.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Dokumen | 6.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Keikutsertaan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 12 | Kegiatan | 315.223.500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Keikutsertaan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 12 | Kegiatan | 315.223.500 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 | Kegiatan | 4.292.562.610 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 | Kegiatan | 4.292.562.610 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Buol, Biau, Kali | Struk Pembayaran Telpn/Internet/Air/Listrik | 3 | Kegiatan | 2.679.752.200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Buol, Biau, Kali | Struk Pembayaran Telpn/Internet/Air/Listrik | 3 | Kegiatan | 2.679.752.200 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Kwitansi/Nota Servis Peralatan dan Perlengkapan | 2 | Kegiatan | 42.150.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Kwitansi/Nota Servis Peralatan dan Perlengkapan | 2 | Kegiatan | 42.150.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jasa Pelayanan Umum Kantor | 14 | Kegiatan | 1.570.660.410 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Buol, Biau, Kali | Jasa Pelayanan Umum Kantor | 14 | Kegiatan | 1.570.660.410 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 | Kegiatan | 153.906.050 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 | Kegiatan | 153.906.050 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Mobil Jabatan Terpelihara | 9 | Unit | 90.478.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Mobil Jabatan Terpelihara | 9 | Unit | 90.478.000 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpilihara | 10 | Unit | 63.428.050 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpilihara | 10 | Unit | 63.428.050 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Gedung Kantor Terehabilitasi | 2 | Kegiatan | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Gedung Kantor Terehabilitasi | 2 | Kegiatan | - | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|---|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------------|---|-----------------------|---|----------------|-----------------|---------------------|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah | 100 | % | 148.965.678.783 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah | 100 | % | 148.965.678.783 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 12 | Dokumen | 786.580.040 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 12 | Dokumen | 786.580.040 |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen KUA & PPAS | 2 | Dokumen | 88.586.990 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen KUA & PPAS | 2 | Dokumen | 88.586.990 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen KUPA & PPAS Perubahan | 2 | Dokumen | 91.881.490 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen KUPA & PPAS Perubahan | 2 | Dokumen | 91.881.490 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA SKPD | 63 | Dokumen | 37.480.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA SKPD | 63 | Dokumen | 37.480.000 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA Perubahan SKPD | 63 | Dokumen | 33.308.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen RKA Perubahan SKPD | 63 | Dokumen | 33.308.000 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen DPA SKPD | 63 | Dokumen | 32.530.055 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen DPA SKPD | 63 | Dokumen | 32.530.055 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen DPA-Perubahan SKPD | 63 | Dokumen | 30.289.575 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen DPA-Perubahan SKPD | 63 | Dokumen | 30.289.575 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | 2 | Dokumen | 135.186.100 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | 2 | Dokumen | 135.186.100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 | Dokumen | 137.040.400 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 | Dokumen | 137.040.400 |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 2 | Dokumen | 61.803.140 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 2 | Dokumen | 61.803.140 |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 | Dokumen | 25.025.640 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 | Dokumen | 25.025.640 |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Belana | 2 | Dokumen | 48.742.140 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Belana | 2 | Dokumen | 48.742.140 |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 | Dokumen | 64.706.510 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Kordnasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 | Dokumen | 64.706.510 |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 8 | Kegiatan | 398.291.310 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 8 | Kegiatan | 398.291.310 |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 3 | Kegiatan | 150.480.405 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 3 | Kegiatan | 150.480.405 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------|--|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 1 | Kegiatan | 27.934.800 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 1 | Kegiatan | 27.934.800 | |
| Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 | Kegiatan | 39.993.300 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 | Kegiatan | 39.993.300 | |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 | Kegiatan | 59.903.600 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 | Kegiatan | 59.903.600 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran KAs dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak yang di susun | 4 | Dokumen | 39.986.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran KAs dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak yang di susun | 4 | Dokumen | 39.986.000 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembiayaan dan Penetapan Uang Daerah Sebagai Optimal Kas | 1 | Kegiatan | - | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembiayaan dan Penetapan Uang Daerah Sebagai Optimal Kas | 1 | Kegiatan | - | |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi SP2D | 4 | Dokumen | 39.994.125 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi SP2D | 4 | Dokumen | 39.994.125 | |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Regulasi tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun | 1 | Dokumen | 39.999.080 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah Regulasi tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun | 1 | Dokumen | 39.999.080 | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 7 | Dokumen | 369.378.925 | Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 7 | Dokumen | 369.378.925 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 | Kegiatan | 52.069.000 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 2 | Kegiatan | 52.069.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|---|-----------------------|--|----------------|----------|---------------------------|---|-----------------------|--|----------------|-----------------|---------------------|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah OPD Yang Melaksanakan Rekonsilias Realisasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban | 4 | Dokumen | 56.640.600 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah OPD Yang Melaksanakan Rekonsilias Realisasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban | 4 | Dokumen | 56.640.600 |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 | Kegiatan | 22.595.250 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 | Kegiatan | 22.595.250 |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan PEMDA | 2 | Dokumen | 159.462.625 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan PEMDA | 2 | Dokumen | 159.462.625 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Akutansi Pemerintah Daerah | 2 | Dokumen | 75.412.300 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Akutansi Pemerintah Daerah | 2 | Dokumen | 75.412.300 |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Laporan TGR | 1 | Dokumen | 3.199.150 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Laporan TGR | 1 | Dokumen | 3.199.150 |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutnsi Pemerintah Daerah | 1 | Dokumen | - | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutnsi Pemerintah Daerah | 1 | Dokumen | - |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 | Kegiatan | 147.411.428.508 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 | Kegiatan | 147.411.428.508 |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah desa yang memperoleh bantuan keuangan | 108 | Desa | 144.311.428.508 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah desa yang memperoleh bantuan keuangan | 108 | Desa | 144.311.428.508 |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah pertanggungjawaban dana darurat | 6 | Wilayah | 3.100.000.000 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah pertanggungjawaban dana darurat | 6 | Wilayah | 3.100.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 612.678.877 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 612.678.877 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--|-----------------------|--|----------------|---------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------|-----------------|---------------------|
| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif 2024 (Rp.) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kebutuhan Dana (Rp) |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 | Dokumen | 612.678.877 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 | Dokumen | 612.678.877 |
| Penyusunan Standar Harga | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis Dan Tipe Barang | 2 | Dokumen | 98.273.014 | Penyusunan Standar Harga | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis Dan Tipe Barang | 2 | Dokumen | 98.273.014 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 51.293.450 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 51.293.450 |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 107.403.738 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 107.403.738 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 79.123.900 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 79.123.900 |
| Penilaian Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Penilaian Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 81.733.175 | Penilaian Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Penilaian Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 81.733.175 |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 35.400.000 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Kegiatan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 35.400.000 |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 4 | Dokumen | 74.697.000 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 4 | Dokumen | 74.697.000 |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 84.754.600 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Buol, Biau, Kali | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 84.754.600 |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renca kerja BPKAD Kab. Buol Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Namun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Keuangan Daerah tidak terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Tabel. 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Buol

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | NIHIL | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buol yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah melakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan di lingkungan internal. Perubahan tersebut antara lain terhadap struktur Organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol terdiri atas 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Hal ini sejalan dengan asas pembentukan perangkat daerah, yaitu efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Dengan ini diharapkan semakin mendorong peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sebagai perwujudan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol yaitu Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Andal melalui Pengendalian dan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Professional, Mandiri, Akuntabel dan Terintegrasi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, sistem dan tata kelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagai *leading sector* telah membangun kerjasama dan komitmen dengan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP RI) Perwakilan Sulawesi Tengah melalui pendampingan menuju kemandirian.

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual melalui sistem tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi yang didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional diharapkan mampu memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Barang/Aset Daerah (SIMBADA), pelaksanaan penatausahaan berbasis kasda online dan pembayaran non tunai sebagai upaya nyata pencegahan terjadinya korupsi dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD Kabupaten Buol serta membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016.

Beberapa langkah dalam pelaksanaan dan peningkatan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, antara lain:

- a) meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- b) menata dan menyempurnakan kebijakan/regulasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah
- c) menindaklanjuti temuan hasil pengawasan;
- d) meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan seluruh OPD
- e) mengembangkan profesionalitas aparatur
- f) melakukan pembinaan dan evaluasi berkala atas kinerja pengelolaan keuangan OPD
- g) meningkatkan intensitas koordinasi dengan aparatur pengawasan pada tahun berjalan maupun dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Buol dituntut dapat melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Buol, sebagai bentuk upaya mensinergikan antara kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dituangkan dalam Renja yang disusun atas dasar prinsip keserasian dan keterpaduan dengan memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya sehingga tercapai optimalisasi anggaran dan kegiatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023, terdapat tujuan strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Buol. Tujuan adalah arah yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud adalah:

- a. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi, dengan sasaran:
 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran APBD Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dengan indikator sasaran, yaitu:
 - 1) Penyusunan APBD tepat waktu, yaitu tanggal 31 Desember pada tahun sebelum tahun anggaran;
 - 2) Persentase kesesuaian antara Renja OPD dan RKA OPD
 2. Peningkatan dan pengembangan aplikasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dari manual menjadi *online*, dengan indikator sasaran, yaitu:
 - 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang mandiri, transparan dan akuntabel;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi, dengan sasaran:
 1. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, dengan indikator sasaran:
 - 1) Jumlah Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Jumlah Buku Standar Biaya Umum (SBU) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buol yang disusun sesuai dengan kondisi riil harga pasar;
 2. Meningkatnya ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
 3. Meningkatnya peranan pengamanan dan pendayagunaan aset/barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
- c. Terlaksananya pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah dengan sasaran:
 1. Pembinaan dan asistensi pengelolaan keuangan daerah dan desa, dengan indikator sasaran adalah terbitnya Keputusan Bupati tentang evaluasi pelaksanaan APBD
 2. Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak, dengan indikator sasaran adalah persentase tersalurnya Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak tepat sasaran kepada organisasi sosial dan masyarakat serta penyampaian pertanggungjawabannya yang tepat waktu sesuai ketentuan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 yang telah disusun dan ditetapkan bersama merupakan perencanaan dan komitmen bersama seluruh komponen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, sehingga menjadi perwujudan semangat dan kebutuhan bersama dalam mensukseskan program dan kegiatan.

Pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol menargetkan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan bersumber dari dana APBD II senilai Rp22.616.339.065,00 yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp20.439.204.004,77, program pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp1.610.700.000,00 program pengelolaan barang milik daerah sebesar Rp566.435.060,00. Rincian program dan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut: (matriks terlampir), terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan
 - 3) Administrasi Umum
 - 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
2. Program Pengelolaan Keuangan, dengan kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel. 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Buol
Nama OPD : BPKAD Kabupaten Buol

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan maju rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|-------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023 (Rp) | Sumber Dana | | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran | | 100% | 17.033.630.574 | | | 100% | 34.661.281.245 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 96.066.078 | | | 1 Laporan | 236.312.944 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1 Dokumen | 12.871.322 | | | 1 Dokumen | 31.662.164 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 41.126.856 | | | 1 Dokumen | 101.167.954 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 7.810.645 | | | 1 Dokumen | 19.213.405 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 8.152.526 | | | 1 Dokumen | 20.054.399 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 7.652.535 | | | 1 Dokumen | 18.824.471 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 1 Laporan | 7.677.418 | | | 1 Laporan | 18.885.680 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1 Laporan | 10.774.776 | | | 1 Laporan | 26.504.871 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 5.133.191.817 | | | 1 Laporan | 5.353.434.396 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 51 Orang Perbulan | 5.037.125.739 | | | 55 Orang Perbulan | 5.117.121.452 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 6000 Dokumen | 87.323.264 | | | 6000 Dokumen | 214.806.498 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 Dokumen | 8.742.813 | | | 1 Dokumen | 21.506.447 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 283.441.742 | | | 1 Laporan | 697.238.341 |

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan maju rencana Tahun 2024 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023 (Rp) | Sumber Dana | | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 51 Paket | 42.744.510 | | | 55 Paket | 105.147.220 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 25 Orang | 240.697.232 | | | 30 Orang | 592.091.121 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 1.047.512.033 | | | 1 Laporan | 2.576.774.851 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 24.572.309 | | | 1 Paket | 60.445.423 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 169.880.316 | | | 1 Paket | 417.888.588 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 1 Paket | 30.687.083 | | | 1 Paket | 75.487.154 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 6 Paket | 267.134.056 | | | 6 Paket | 657.123.064 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 6 Paket | 17.652.895 | | | 6 Paket | 43.424.357 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 36 Dokumen | 12.585.375 | | | 36 Dokumen | 30.958.764 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 12 Laporan | 75.000.000 | | | 12 Laporan | 184.492.500 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 Laporan | 450.000.000 | | | 12 Laporan | 1.106.955.000 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 9.939.411.810 | | | 1 Laporan | 24.483.916.661 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 8.017.168.448 | | | 12 Laporan | 19.755.390.216 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 47.629.500 | | | 12 Laporan | 117.163.807 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 1.874.613.862 | | | 12 Laporan | 4.611.362.638 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 534.007.095 | | | 1 Laporan | 1.313.604.052 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 20 Unit | 262.852.295 | | | 20 Unit | 646.590.359 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 2 Unit | 45.154.800 | | | 2 Unit | 111.076.293 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 Unit | 226.000.000 | | | 1 Unit | 555.937.400 |

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan maju rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023 (Rp) | Sumber Dana | | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100% | 153.838.238.285 | | | 100% | 160.779.101.501 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 697.065.533 | | | 1 Laporan | 1.714.711.506 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | 2 Dokumen | 69.094.856 | | | 2 Dokumen | 169.966.436 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | 2 Dokumen | 66.156.121 | | | 2 Dokumen | 162.737.443 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikas | | 60 Dokumen | 35.562.140 | | | 60 Dokumen | 87.479.307 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | 60 Dokumen | 25.346.902 | | | 60 Dokumen | 62.350.845 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikas | | 60 Dokumen | 36.758.962 | | | 60 Dokumen | 90.423.371 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | umlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | 60 Dokumen | 10.080.532 | | | 60 Dokumen | 24.797.101 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | 2 Dokumen | 104.239.590 | | | 2 Dokumen | 256.418.968 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | 2 Dokumen | 108.259.198 | | | 2 Dokumen | 266.306.801 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi, Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | 2 Dokumen | 40.329.237 | | | 2 Dokumen | 99.205.889 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Dokumen | | 2 Dokumen | 28.278.973 | | | 2 Dokumen | 69.563.446 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | 2 Dokumen | 59.744.953 | | | 2 Dokumen | 146.966.610 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | 2 Dokumen | 38.214.069 | | | 2 Dokumen | 94.002.788 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 180 Orang | 75.000.000 | | | 180 Orang | 184.492.500 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 442.934.652 | | | 1 Laporan | 1.089.574.949 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | 12 Dokumen | 193.891.276 | | | 12 Dokumen | 476.953.150 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | 12 Dokumen | 18.535.334 | | | 12 Dokumen | 45.595.067 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | umlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | 12 Dokumen | 54.787.598 | | | 12 Dokumen | 134.772.012 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | 1 Dokumen | 25.505.230 | | | 1 Dokumen | 62.740.315 |

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan maju rencana Tahun 2024 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023 (Rp) | Sumber Dana | | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 12 Laporan | 24.854.350 | | | 12 Laporan | 61.139.216 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | 12 Dokumen | 35.360.864 | | | 12 Dokumen | 86.984.189 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | 12 Dokumen | 15.000.000 | | | 12 Dokumen | 36.898.500 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | | 180 Orang | 75.000.000 | | | 180 Orang | 184.492.500 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 446.168.332 | | | 1 Laporan | 1.097.529.479 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | 12 Laporan | 58.637.395 | | | 12 Laporan | 144.242.128 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset kewajiban ekuitas, Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | 12 Dokumen | 43.175.859 | | | 12 Dokumen | 106.208.296 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | | 5 Laporan | 14.509.200 | | | 5 Laporan | 35.691.181 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | 12 Laporan | 203.735.469 | | | 12 Laporan | 501.168.880 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | | 12 Dokumen | 49.132.400 | | | 12 Dokumen | 120.860.791 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | 3 Dokumen | 1.978.009 | | | 3 Dokumen | 4.865.703 |

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Rencana tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan maju rencana Tahun 2024 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2023 (Rp) | Sumber Dana | | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota | | 180 Orang | 75.000.000 | | | 180 Orang | 184.492.500 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 152.252.069.769 | | | 1 Laporan | 156.877.285.568 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | 1 Laporan | 383.378.152 | | | 1 Laporan | 943.071.916 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | 1 Laporan | 148.718.691.617 | | | 1 Laporan | 152.626.713.652 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | 1 Laporan | 3.150.000.000 | | | 1 Laporan | 3.307.500.000 |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 100% | 650.595.506 | | | 100% | 1.600.399.885 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Buol | 1 Laporan | 650.595.506 | | | 1 Laporan | 1.600.399.885 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | 1 Dokumen | 49.559.407 | | | 1 Dokumen | 121.911.184 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | 1 Dokumen | 28.058.126 | | | 1 Dokumen | 69.020.184 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 75.000.000 | | | 1 Laporan | 184.492.500 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 85.849.289 | | | 1 Laporan | 211.180.666 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 82.799.507 | | | 1 Laporan | 203.678.507 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 141.780.818 | | | 1 Laporan | 348.766.633 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 27.459.000 | | | 1 Laporan | 67.546.394 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 63.197.736 | | | 1 Laporan | 155.460.111 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | 1 Laporan | 96.891.624 | | | 1 Laporan | 238.343.706 |

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD
KABUPATEN BUOL TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol 2017-2024 dan untuk mengimplementasikan rencana tahun ke empat pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2024, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dengan alokasi anggaran pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.1
Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2023
Kabupaten Buol

Nama OPD : BPKAD Kabupaten Buol

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|--|------------------------|-------------|
| 5.02 | KEUANGAN | 171.522.464.365 | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.134.217.594 | |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 98.183.980 | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.196.640 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.743.890 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.700.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.975.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.433.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.860.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 3.484.000 | DBH |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 40.960.125 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.888.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.750.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.686.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.646.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.835.125 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 18.154.000 | DBH |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.808.750 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 282.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.222.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 750.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.275.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.928.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.350.000 | DBH |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.151.250 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 550.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.158.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.840.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.082.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 935.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.585.000 | DBH |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|---|---------------|-------------|
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.647.850 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 312.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.499.100 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.465.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 810.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.210.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.350.000 | DBH |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.655.730 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 320.730 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.700.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.203.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.082.000 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.350.000 | DBH |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.763.635 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 507.885 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.700.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.215.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.028.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.962.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.350.000 | DBH |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.343.827.799 | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.247.861.179 | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 5.037.140.279 | DAU |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 222.454.702 | DAU |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 214.270.000 | DAU |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 77.275.000 | DAU |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 149.040.360 | DAU |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 6.500.000 | DAU |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 50.000 | DAU |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 116.211.692 | DAU |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 5.739.131 | DAU |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 17.217.361 | DAU |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 2.401.962.654 | DAU |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.226.200 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.929.450 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4.975.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.625.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 38.500.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5.769.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.432.500 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 13.995.000 | DBH |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.740.420 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.095.420 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.123.500 | DBH |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.687.500 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.834.000 | DBH |
| 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 189.642.388 | |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 42.527.000 | |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 39.207.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 3.320.000 | DBH |
| 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 147.115.388 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.440.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.438.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.630.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 9.221.638 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.925.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 5.596.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 112.864.000 | DBH |
| 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 865.545.725 | |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.384.625 | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 10.384.625 | DBH |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 162.550.000 | |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 143.900.000 | DBH |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 18.650.000 | DBH |
| 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.630.740 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 30.630.740 | DBH |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 84.597.250 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 84.597.250 | PAD |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.702.500 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.702.500 | DBH |
| 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.900.000 | |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 7.900.000 | DBH |
| 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 108.703.310 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.277.310 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.764.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.125.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.176.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 56.990.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 22.836.750 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 18.534.000 | DBH |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 450.077.300 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 379.157.300 | DAU |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 70.920.000 | DBH |
| 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.124.916.052 | |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.381.715.732 | |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 8.409.600 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 4.216.709.588 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 156.596.544 | DAU |
| 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.740.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|---|-----------------|-------------|
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 47.740.000 | DBH |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.695.460.320 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | DAU |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 21.600.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 683.400.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 46.200.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 342.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 6.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36.900.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 60.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 27.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 15.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 171.120.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 258.000.000 | DAU |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 7.500.000 | DBH |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 3.820.320 | DAU |
| 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 512.101.650 | |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 265.091.650 | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 124.181.650 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 6.840.000 | DBH |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 103.350.000 | DBH |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 30.720.000 | DBH |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47.010.000 | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39.250.000 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 7.760.000 | DBH |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 200.000.000 | DBH |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 154.744.772.017 | |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 697.065.495 | |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 69.094.500 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 516.850 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.038.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 20.420.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 661.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46.457.400 | PAD |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 66.251.490 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 458.990 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.200.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 18.574.750 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 871.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45.146.250 | PAD |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 24.517.065 | |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 660.000 | PAD |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 279.375 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 570.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 110.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.363.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.583.550 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 450.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 458.640 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 19.042.500 | PAD |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 25.342.245 | |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 440.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 612.270 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 427.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 55.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 504.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 678.375 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 800.100 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 21.825.000 | PAD |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 22.738.600 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 701.225 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 341.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 504.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.190.925 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 151.200 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 19.850.000 | PAD |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 22.984.140 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 311.875 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 427.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 55.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.008.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.130.625 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 238.140 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 19.813.000 | PAD |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 108.385.425 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.650.600 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 58.215.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.015.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 56.700 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.368.125 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 32.080.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 131.860.100 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 268.750 | DBH |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|----------------------|---|-------------|--------------------|
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.894.150 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 59.771.125 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.061.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 56.700 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.574.375 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 48.234.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 36.256.390 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 376.390 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 720.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.685.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.504.500 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17.700.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 24.335.640 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 506.390 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 720.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.838.750 | PAD |
| 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 58.136.890 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.136.390 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 720.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 110.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 946.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2.261.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 345.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52.618.000 | PAD |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 37.667.760 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 603.010 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 832.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.306.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 16.200.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 3.575.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15.151.000 | DAU |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 69.495.250 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.690.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 45.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20.321.250 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 18.900.000 | DAU |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 28.539.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 388.145.251 | |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 191.249.501 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.918.240 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 27.450.000 | DBH |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 32.821.638 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 539.723 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 756.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.410.100 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 63.100.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 50.253.800 | DAU |
| 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 20.694.400 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 180.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.500.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.680.400 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 17.334.000 | DBH |
| 5.02.02.2.02.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 0 | |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 25.986.000 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.986.000 | DAU |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 24.855.325 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 339.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 417.325 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 20.879.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.220.000 | DBH |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 35.359.750 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.962.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.453.500 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 26.944.000 | DBH |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 15.000.460 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 570.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 725.760 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.704.700 | PAD |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 74.999.815 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.456.715 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.007.600 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.517.500 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 57.138.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.880.000 | DBH |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 525.706.450 | |
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 58.636.750 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 266.250 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 810.500 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.908.000 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.292.000 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32.360.000 | PAD |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|-------------------|---|-----------------|-------------|
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 43.175.575 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 400.625 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 607.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.016.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.151.950 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 36.000.000 | DBH |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 16.483.000 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 316.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.705.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 6.822.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.640.000 | PAD |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 203.735.075 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.278.750 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11.255.375 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 676.250 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.979.500 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.000.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 61.050.000 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 107.495.200 | PAD |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 49.074.500 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 416.250 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 353.750 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 20.605.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.008.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.658.500 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 4.879.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 14.154.000 | PAD |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 79.593.950 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.150.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.394.700 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.858.750 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.322.500 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 770.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 3.850.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21.600.000 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36.648.000 | PAD |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 75.007.600 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.056.000 | PAD |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 73.951.600 | PAD |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 153.133.854.821 | |
| 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 45.697.000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.697.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 41.000.000 | DAU |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 149.938.157.821 | |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.029.274.035 | DBH |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 64.489.730.582 | DAU |
| 5.4.02.05.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 84.419.153.204 | DD |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 3.150.000.000 | |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 3.150.000.000 | DAU |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 643.474.754 | |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 643.474.754 | |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | 82.577.882 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.495.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 690.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.125.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.717.632 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.650.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 75.900.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 17.380.000 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.620.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 12.760.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 65.954.700 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.160.000 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.400.000 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 17.600.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 39.794.700 | DBH |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 75.900.822 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.483.540 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.452.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 750.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.320.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.070.132 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9.348.750 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 2.750.000 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 29.200.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.811.400 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 13.715.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 73.269.900 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 988.800 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.892.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.803.600 | PAD |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 6.450.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 60.135.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 129.669.750 | |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 25.200.000 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 320.000 | DBH |

| KODE REKENING | URAIAN | PAGU | SUMBER DANA |
|----------------------|---|-------------|--------------------|
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 690.250 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 587.500 | DBH |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.500.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.867.000 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 8.500.000 | DBH |
| 5.1.02.02.08.0033 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 70.000.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17.005.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 59.852.000 | |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 24.300.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35.552.000 | DAU |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 44.916.200 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.000.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.316.200 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 32.600.000 | DBH |
| 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 93.953.500 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.000.000 | PAD |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.302.800 | DBH |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 30.220.000 | DBH |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40.430.700 | DBH |

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 merupakan bagian dari siklus perencanaan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dan mengamanatkan bahwa OPD diwajibkan untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol diawali dengan penyusunan Rancangan Renja dan dievaluasi secara bersama-sama oleh seluruh *stakeholders* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sehingga Renja yang dihasilkan adalah penyatuan persepsi dan komitmen bersama seluruh *stakeholders* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol atas dasar kebutuhan organisasi dalam mendukung tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Akhirnya, semoga Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan RKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Kabupaten Buol.

Buol, Juli 2022

KEPALA BPKAD KABUPATEN BUOL



SYARIF PUSADAN, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710818 200003 1 006